

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sebuah ilmu sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab berbagai masalah-masalah sosial dan alam yang menjadi bidang garapannya. Semakin fungsional sebuah ilmu dalam arti mampu menjalankan sekurang-kurangnya lima fungsi utama ilmu akan semakin banyak pendukungnya. Hal tersebut pada gilirannya akan mendorong semakin banyak orang yang mempelajari dan menghasilkan teori maupun konsep baru. Sebaliknya, apabila sebuah ilmu tidak fungsional dalam menjawab kebutuhan masyarakat, maka ilmu tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat dan akhirnya akan mati.

Kemampuan suatu ilmu untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat akan sangat tergantung pada epistemologinya, karena salah satu hal yang membedakan antara ilmu satu dengan ilmu lainnya adalah dari segi metodologinya<sup>1</sup>

Demikian juga halnya dengan Ilmu Pemerintahan. Dari berbagai literature dapat dilihat bahwa bahwa pemerintahan disamping sebagai sebuah *pengetahuan (knowledge)* adalah sekaligus juga merupakan sebuah *kemahiran (know-how)*. Karena itu Ilmu Pemerintahan diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan

dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya.

Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Dari 460 lebih kabupaten di Indonesia, 199 kabupaten di antaranya daerah tertinggal. Dari 100 26 kabupaten residennya di daerah

tertinggal dan masyarakatnya miskin. Di Kalimantan, yang berbatasan dengan Malaysia, misalnya masyarakat Indonesia jauh tertinggal dan memprihatinkan.<sup>2</sup>

Intervensi pemerintah untuk daerah perbatasan setiap tahun kian menurun. Tahun 2008 lalu, anggaran yang diarahkan untuk membangun daerah tertinggal hanya Rp 1,6 triliun. "Tahun 2009, anggaran untuk membangun daerah tertinggal bukannya naik, tapi turun dibanding tahun lalu, yaitu Rp1,2 triliun."<sup>3</sup>

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie mengatakan, fakta yang terjadi di wilayah perbatasan saat ini justru keablasan dengan segala potensi yang dimiliki. Alih-alih jadi daerah yang makmur dan sejahtera, perbatasan justru menjadi daerah miskin dan terbelakang.

Salah satu masalah klasik di wilayah perbatasan yang hingga kini belum juga tuntas tertangani adalah masalah kemiskinan. Pada masa sebelum reformasi, hal ini terkait dengan paradigma pemerintah yang melihat daerah perbatasan sebagai sebuah wilayah rawan yang harus didekati dengan pendekatan keamanan nir kesejahteraan. Sebagai dampaknya tidak mengherankan wilayah tersebut menjadi tertinggal dan terbelakang, serta masyarakatnya miskin.

Belum ada dari semua kawasan perbatasan tersebut yang mendapatkan pemerataan pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan wilayah perbatasan cenderung seperti diacuhkan padahal kawasan perbatasan lah yang menjadi

---

<sup>2</sup> Laporan Penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat).

<sup>3</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2009/02/16/19342004126.kabupaten.perbatasan.masih.tertinggal>

serambi atau tembok awal pertahanan kita bangsa Indonesia dari Negara tetangga. Untuk kawasan Kalimantan saja baru Entikong yang mendapatkan perhatian pemerintah melalui BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

Semisal contoh wilayah di pulau Kalimantan sendiri memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 kilometer yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau.

Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten di Kalimantan Timur, hanya terdapat 3 (tiga) pintu perbatasan (*border gate*) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas *Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)* dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia Bagian Pertama: Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan, hal 6

Kawasan perbatasan daerah lain seperti di Kabupaten Sintang, Sambas, Kapuas Hulu, Malinau dan Kutai Barat masih belum memiliki pintu perbatasan resmi dan masih dalam tahap pembangunan. Sesuai kesepakatan dengan pihak Malaysia dalam forum Sosek Malindo, sebenarnya telah disepakati pembukaan beberapa pintu perbatasan secara bertahap di beberapa kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sintang dan Bengkayang.<sup>5</sup>

Namun demikian, masyarakat di sekitar perbatasan sudah menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi sejak lama sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan. Pos-pos keamanan dan pertahanan yang tersedia di sepanjang jalur tradisional tersebut masih sangat terbatas, demikian pula dengan kegiatan patroli keamanan yang masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana dan prasarana transportasi.<sup>6</sup>

Potensi sumberdaya alam kawasan perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur maupun Kalimantan Barat. Beberapa sumberdaya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Bentuang Kerimun, Suaka Margasatwa Danau

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 7

Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur.

Saat ini beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Seiring dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di kawasan tersebut, maka berbagai kegiatan ilegal telah terjadi seperti pencurian kayu atau penebangan kayu liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh oknum-oknum di Negara tetangga bekerjasama dengan masyarakat Indonesia. Kegiatan penebangan kayu secara liar oleh orang-orang Indonesia ini dipicu oleh kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di kawasan tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kawasan atau wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang adalah di Kecamatan Senaning. Senaning merupakan Daerah Perbatasan yang idealnya menjadi serambi depan NKRI, namun ironisnya kawasan sepanjang perbatasan justru menjadi kawasan tepian Indonesia yang luput dari perhatian Pemerintah sehingga terjadi kesenjangan sosial, Ekonomi dan Budaya yang cukup signifikan dengan Negara tetangga Malaysia. Sehingga Nasionalisme Bangsa dapat melemah ketika berhadapan dengan kemakmuran yang terlihat di negeri seberang

Tidak heran banyak WNI yang menggantungkan kehidupannya kepada Kerajaan Malaysia yang lebih menjanjikan dan infrastrukturnya memadai.

Pemerintah pusat sendiri telah melakukan perhatian khusus untuk wilayah perbatasan diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali untuk wilayah Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Melalui BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) pemerintah berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan dalam semua bidang. Seperti ekonomi, pemerintahan dan juga sarana dan prasarana transportasi. Dan juga memaksimalkan SDA yang ada di daerah tersebut.<sup>8</sup>

Namun itu baru berlaku untuk kawasan Entikong di Kabupaten Sanggau, yang belum merata diseluruh kawasan perbatasan di Kalimantan dan secara umum di seluruh wilayah perbatasan di Indonesia. Secara yuridis formal, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebenarnya juga dijelaskan, bahwa program prioritas pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain, maka pembangunan perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas utama.

Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan, jangankan untuk hidup secara sejahtera, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2010, tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

tangga dan kebutuhan hidup lainnya banyak warga masyarakat di kawasan perbatasan yang menggantungkan hidupnya pada Negara lain. Begitu juga masalah-masalah yang timbul di Kecamatan Senaning Kabupaten Sintang di beberapa desanya yaitu desa Nanga Bayan dan desa Jasa yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia tidak jauh berbeda dengan kawasan perbatasan lainnya yang ada di Indonesia. Kebanyakan masalah yang muncul adalah lambatnya pembangunan infra dan supra struktur oleh pemerintah terkait, masalah kesejahteraan, masalah sosial politik, pendidikan, dan juga keamanan yang kesemua aspek tersebut belum terpenuhi secara maksimal.

Dalam bidang pendidikan sendiri baru-baru ini terjadi hal yang sangat memprihatinkan dimana Sejumlah guru yang mengajar di Senaning, perbatasan Indonesia - Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Senin, melakukan aksi mogok mengajar dan menuntut pembayaran tunjangan guru perbatasan tahun 2011 yang belum dicairkan pemerintah.<sup>9</sup>

Para guru tersebut menunggu kepastian dari pemerintah mengenai tunjangan bagi guru-guru di perbatasan. Yang menjadi acuan mereka itu, Surat Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pencairan tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Sintang yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan atas nama Menteri Pendidikan Nasional.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>.<http://www.antaraneews.com/berita/275336/guru-sd-senaning-perbatasan-indonesia-malaysia-mogok-mengajar>

<sup>10</sup> Surat Kementerian Pendidikan Nasional No.011.1340/C.5.6/H/SK/2011, tertanggal 16 Juli 2011.



Sedangkan untuk akses dan sarana transportasi menuju Kecamatan Senaning maupun ke Desa Jasa yang langsung berbatasan dengan Serawak masih sangat memprihatinkan. Untuk menuju Kecamatan Senaning dari Kabupaten Sintang menempuh perjalanan sekitar 7 sampai 8 jam baik itu melalui jalan darat dan jika musim penghujan maka hanya bisa menggunakan Speed Boat melalui sungai Kapuas dan sungai Ketungau. Kondisi jalan yang buruk dan terputus jika musim penghujan tiba sedikit banyak mempengaruhi kemajuan dan perkembangan di wilayah perbatasan di Kecamatan Senaning. Selain itu akses jalan yang buruk juga membuat masyarakat sekitar sulit untuk menjual hasil panen mereka keluar Kecamatan. Sehingga mereka terpaksa untuk menjual hasil panen mereka ke Negara Malaysia karena tuntutan kebutuhan mereka tidak dapat berbuat banyak.

Hal ini juga dikarenakan tidak adanya angkutan umum yang dapat menghubungkan masyarakat dengan Kabupaten Sintang. Kalaupun ada, mereka harus mengeluarkan uang ekstra untuk menggunakan mobil khusus yang dapat melewati rute jalan yang rusak. Dengan uang sekitar Rp.300.000,00 untuk sekali jalan sangat membebani bagi mereka kalangan menengah kebawah, itupun harus menunggu saat bulan kemarau saat jalan kering. Jika musim hujan maka mereka harus menggunakan Speed Boat dengan daya angkut yang sangat terbatas dengan ongkos yang kurang lebih sama mahalanya.

Itulan mengapa tidak sedikit masyarakat yang langsung menjualnya ke wilayah perbatasan menjualnya langsung ke Serawak Malaysia. Sehingga tidak

jarang mereka dibayar dengan uang Ringgit Malaysia, sungguh sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan dimana begitu mudahnya uang Negara lain beredar bebas di Negara kita. Hal ini kembali membuktikan bahwa tidak adanya keseriusan dari pemerintah terkait dalam pemerataan pembangunan di Kawasan perbatasan.

Alasan lain mengapa masyarakat lebih memilih menjual hasil alam mereka karena dari segi jarak tempuh lebih cepat dan dengan biaya yang lebih minim tentunya. Sebab jarak Senaning ke desa Jasa (desa terdekat dengan Malaysia) sekitar 22 kilometer yang masih dapat ditempuh dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Sedangkan dari Jasa ke desa di wilayah Malaysia, yakni Kampung Lacau, sekitar 2,5 jam perjalanan kaki dan jika sambil memikul barang perjalanan akan ditempuh selama 3 jam melewati hutan dan perbukitan. Jarak yang lebih mereka pilih ketimbang harus menempuh 8 jam perjalanan dengan ongkos yang jauh dari jangkauan keuangan mereka untuk sampai di Kabupaten Sintang.<sup>11</sup>

Selain itu beredarnya uang Ringgit juga disebabkan karena banyak masyarakat di Desa Jasa yang menjadi buruh kerja baik itu di perkebunan kelapa sawit ataupun perkebunan karet milik Malaysia. Untuk status mereka belum dapat diketahui apakah mereka bekerja secara resmi atau malah illegal. Tapi hal ini membuktikan bahwa masyarakat menengah kebawah lebih menggantungkan hidup mereka ke Negara tetangga, bukan negaranya. Minimnya pengawasan keamanan di

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Waluyo Utomo, melalui media komunikasi pada hari Jum'at 7 Oktober 2011

kawasan perbatasan RI-Serawak khususnya wilayah Desa Jasa dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Letak geografis yang luas dan juga kontur daerah yang berbukit-bukit dengan akses jalan setapak mempersulit koordinasi yang dilakukan oleh Polsek Urban Senaning.
- b. Belum adanya Gate (gerbang lintaa batas) antar wilayah perbatasan kedua Negara, sehingga sangat memudahkan masyarakat sekitar keluar masuk.
- c. Tidak adanya ketegasan peraturan mengenai mobilisasi dari Desa Jasa ke Serawak dan juga sebaliknya.
- d. Jumlah personel keamanan atau polisi perbatasan yang jauh dari kata mencukupi.

Keberadaan Polsek Senaning, sebagai salah satu Polsek yang berada di wilayah perbatasan dengan cakupan wilayah hukum 18 desa, kondisinya memang sangat jauh berbeda dengan Polsek lainnya. Perubahan status Polsek Senaning, dari Polsek Lural menjadi Polsek Urban beberapa waktu yang lalu, tidak diikuti dengan perubahan kondisi asrama dan kantor Polsek yang saat ini sudah mulai rapuh dimakan usia. Jumlah personel yang ada pada Polsek yang berstatus urban hanya ada

16 personil yang ditempatkan di Polsek Kecamatan Ketungau Hulu. Seharusnya, di polsek urban itu harus memiliki personil berjumlah 90 orang.<sup>12</sup>

Kapolres Sintang AKBP Firly R. Samosir, M.Si mengatakan selain banyak kerusakan, tempat tinggal para personilnya yang ditempatkan di sebuah asrama juga sangat memprihatinkan. Mulai dari bangunan yang sudah tua, dan jika hujan turun banyak bagian atap yang mengalami kebocoran. Atap asrama sebagian besar masih menggunakan sirap, dan harusnya sudah diganti dengan atap seng.

Belum lagi kantor Kapolsek yang letaknya satu kawasan dengan asrama sangat kurang terawat dan kumuh. Bangunan asrama yang dibangun pada tahun 1977, seharusnya sudah layak untuk dilakukan rehabilitasi fisik. Namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan anggaran. Sementara dengan lahan yang ditempati untuk asrama dan kantor Polsek seluas kurang lebih 2000 meter persegi tersebut merupakan lahan hibah.

Polsek Urban ini dibentuk dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah untuk mengatasi masalah lintas batas melalui yang namanya jalan tikus itu. Yang sering digunakan masyarakat sebagai akses keluar masuk ke Serawak Malaysia. Hal ini tentunya semakin mempersulit aparat keamanan untuk mengamankan wilayah perbatasan, karena akses jalan tikus yang digunakan pun selalu berpindah-pindah.

---

<sup>12</sup> <http://postketanantianak.com/berita/513-polsek-urban-senang-memprihatinkan.html>

Pemerintah pusat sendiri telah melakukan perhatian khusus untuk wilayah perbatasan diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali untuk wilayah Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Melalui BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) pemerintah berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan dalam segala aspek.<sup>13</sup> Seperti ekonomi, pemerintahan, keamanan, pendidikan, dan juga sarana dan prasarana transportasi. Yang tentunya juga akan memaksimalkan SDA yang ada di daerah tersebut untuk dikembalikan lagi kemasyarakāt tersebut.

Seperti kunjungan yg dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Ke Senaning, dalam kunjungannya kali ini beliau juga mengucurkan dana bantuan bagi masyarakat Ketungau Hulu yakni uang 25 milyar untuk tahun 2010 ini untuk memperbaiki jalan dari Sintang menuju Senaning. Dana untuk perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan tersebut akan kita kucurkan lagi pada tahun 2011. Dana itu akan masuk anggaran perubahan dan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan RI. Kemudian untuk perbaikan jalan dari Desa Jasa ke Sungai Kelik Gubernur memberikan dana bantuan sebesar 1 milyar.<sup>14</sup>

Oleh karena itu dapat dilihat nantinya apakah dana bantuan tersebut dapat digunakan dengan maksimal untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi masyarakat di Kecamatan Senaning. Implementasi dari kebijakan tersebut diharapkan

akan tepat sasaran dan tidak lagi ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Karena pembangunan di wilayah perbatasan harus disegerakan sebagai usaha bersama dalam mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia.

Karena berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan tentang pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota secara hukum berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan (CIQS). Meskipun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengembangkan aspek sosial-ekonomi kawasan perbatasan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya, masih adanya paradigma pembangunan wilayah yang terpusat, sehingga kawasan perbatasan hanya dianggap sebagai “halaman belakang”.<sup>15</sup>

Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai pemerintah daerah terkait wilayah perbatasan di Kecamatan Senaning diharapkan mampu berbuat lebih tanpa harus mendapat komando dari pemerintah pusat. Terlebih rencana pemekaran wilayah yang akan dilakukan oleh 5 Kabupaten yakni Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu, dengan Sintang sebagai Kordinator. Sehingga Kabupaten Sintang harus

melakukan pembangunan di wilayah perbatasan yang ada sebagai prioritas utama khususnya pembangunan akses jalan, sarana dan prasarana transportasi serta pembangunan Gate dan tepal batas.. Hal ini juga akan menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat bahwa persiapan yang dilakukan Kabupaten Sintang untuk menuju Provinsi Kapuas Raya tidak main-main .

Jika kita lihat jauh ke perbatasan Negara lain, semisal contoh perbatasan di Negara Amerika Serikat dan Kanada secara resmi disebut International Boundary yang merupakan perbatasan Negara terpanjang di Dunia. Pembangunan perbatasan di kedua wilayah menjadi prioritas utama, hal ini dikarenakan dapat memberikan banyak keuntungan bagi kedua wilayah Negara. Baik itu dari segi politik, ekonomi, pendidikan dan keamanan. Perbatasan internasional kedua Negara merupakan perbatasan umum yang terpanjang di Dunia dan yang tidak dijaga sama sekali oleh kedua Negara. Semua orang yang akan menuju AS dari Kanada harus melewati fasilitas imigrasi di Kanada sehingga ketika tiba di AS mereka tidak perlu mengurus imigrasi, sistem ini juga diberlakukan di bandar udara internasional dan stasiun kereta api di Kanada.<sup>16</sup>

Sedangkan untuk wilayah AS yang berbatasan dengan Mexico dibangun pagar tinggi menjulang sampai batas laut untuk memisahkan kedua wilayah Negara.

---

<sup>16</sup> P. 1. [http://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan\\_Kanada\\_Amerika\\_Serikat](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Kanada_Amerika_Serikat)

Hal ini dianggap wajar karena melindungi kedaulatan Negara dan juga mencegah penyelundupan Narkoba dari Mexico.<sup>17</sup>

Berbeda sekali dengan Negara kita Indonesia, batas wilayah yang digunakan hanya patok BPN yang sangat mungkin untuk dipindahkan. Seharusnya pemerintah dapat belajar dari hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan, sehingga pembangunan dan perlindungan kawasan perbatasan harus diutamakan. Sehingga nantinya ketika pembangunan di wilayah perbatasan telah berhasil dengan baik, dan terimplementasi dengan baik pula tentunya kawasan Kecamatan Senaning akan menjadi Serambi Terdepan Kabupaten Sintang khususnya dan secara umum Indonesia dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan NKRI.

Oleh karena itu melalui penelitian ini dengan menggunakan beberapa variable untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pembangunan di wilayah pebatasan, khususnya di wilayah Kecamatan Senaning Kabupaten Sintang. Yang akan diulas dalam laporan akhir mengenai **Analisis Permasalahan Pendidikan, Hankam Dan Infrastruktur Publik Di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia - Malaysia, Studi Kasus Di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.**



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti mengajukan beberapa *problem statement* yaitu:

1. Bagaimana kondisi bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta infrastruktur publik di desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya, sehingga masyarakat di desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu terancam?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Untuk mengetahui fakta riil mengenai keadaan sosial budaya masyarakat dan juga masalah-masalah yang dihadapi masyarakat daerah perbatasan di Kecamatan Senaning, dengan berbagai dimensi yang ada. Dan juga untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dan pemerataan pembangunan kawasan perbatasan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui BNPP.

Yang terakhir adalah upaya untuk mengetahui tindakan nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Senaning. Sebagai persiapan rencana pemekaran menjadi Provinsi Kapuas Raya.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi di kawasan perbatasan di Kecamatan Senaning dalam upaya mempertahankan NKRI.
- 2) Untuk dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi pembangunan di kawasan perbatasan. Dan juga sebagai jembatan komunikasi masyarakat

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti dan pembaca dalam lebih memahami teori dan secara praktiknya dapat memecahkan masalah yang ada dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah disampaikan.

### **1.4.1 Kegunaan Teoritik**

Kegunaan penelitian secara teoritik yang diharapkan oleh penulis adalah mampu mengembangkan pemahaman keilmuan mengenai teori yang berkaitan dengan perbatasanan Negara dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktik**

Kegunaan penelitian secara praktik diutamakan untuk memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah yang terkait dalam pembangunan wilayah perbatasan agar dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik dan memperoleh output yang baik pula. Sehingga nantinya dapat melihat tolak ukur kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya.

## **1.5 Kerangka Dasar Teori**

### **1.5.1 Desentralisasi, Otonomi dan Wewenang Dalam Negara Kesatuan**

Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan mengandung arti penetapan strategi, kebijaksanaan dan program, termasuk pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Daerah Otonom beserta penyerahan wewenangnya serta pengembangannya

Perwujudan desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah atau disingkat otonomi, desentralisasi sering disebut pemberian otonomi.<sup>18</sup>

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia . Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.<sup>19</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Tujuan dari desentralisasi adalah :<sup>20</sup>

- a. Mencegah pemusatan keuangan.
- b. Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.

---

<sup>18</sup> Laporan Penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat).

<sup>19</sup> <http://www.mahasiswa.uigm.ac.id/?pilih=berita&berita=news2010&news=150620101>

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Konsep desentralisasi dikenal bermacam-macam jenis yang diberikan oleh para pakar dan rumusan menurut UU No.32 Tahun 2004, yaitu ada desentralisasi politik, fungsional, dan kebudayaan. Ada juga yang membagi desentralisasi ke dalam dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Desentralisasi ketatanegaraan dibagi dua yaitu; desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial dikenal dua bentuk yaitu, "otonom" dan "*medebewind*" atau "*zelfbestuur*". Sedangkan yang dimaksud otonomi daerah atau secara singkat otonomi adalah pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar Pemerintah Pusat.

Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.

Dampak positif dalam bidang politik adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya memeningkat

kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.<sup>21</sup>

Otonomi merupakan inti desentralisasi, dalam teori, terdapat tiga sistem otonomi atau rumah tangga daerah, yaitu sistem otonomi formal, materil, dan riil atau nyata. Sistem otonomi merupakan tatanan yang berkaitan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.<sup>22</sup>

Ketiga sistem otonomi tersebut mempunyai bobot yang berbeda dalam hal pelaksanaan prinsip permusyawaratan dalam pemerintahan daerah. Para *founding fathers* negara kesatuan republik Indonesia sejak awal telah menentukan pilihan dan prinsip pembagian kekuasaan (desentralisasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pentingnya fungsi pemerintah di daerah ini, terbukti dengan dicantumkannya dalam ketiga Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Pemerintah Daerah bukan saja sekedar untuk mencapai sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, tetapi erat sekali dengan usaha mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis.

---

<sup>21</sup> <http://www.mahasiswa.uigm.ac.id/?pilih=berita&berita=news2010&news=150620101>

<sup>22</sup> Laporan Penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat)

### 1.5.2. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan.<sup>23</sup>

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :

- a. Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara.
- b. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

- c. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
- d. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI. Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi *concern* setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya.

Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses *nation state building* terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (*neighbourhood countries*). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Eddy Sianturi dan Nefriah, Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI, Penelitian





## 2. Aspek Politik.

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di Negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal ini pun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

## 3. Aspek Ekonomi

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain; Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal), langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*). Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah

#### **4. Aspek Sosial Budaya**

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturnisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.

#### **5. Aspek Pertahanan dan Keamanan.**

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganan

Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi *domain* pemerintah pusat.

Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan.

Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (*security approach*) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan (*prosperity/development approach*).

Dengan adanya reorientasi ini diharapkan penanganan pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat di perbatasan. Konsepsi pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu: Politik Pemerintahan Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah, dan Politik luar negeri yang bebas-aktif. Oleh sebab itu dalam formulasi kebijakannya harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas.<sup>26</sup>

### **1.5.3 Konsep Perencanaan Pengembangan Kawasan Perbatasan**

Perencanaan pengembangan kawasan perbatasan berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan penanganannya. Perencanaan pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya serta kewilayahan. Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu kawasan yang dihuni komunitas yang mengalami berbagai permasalahan sosial dan ekonomi karena keterbatasan wilayah dan lokasi menjadi wilayah yang maju, yang komunitasnya memperoleh kesejahteraan dan kualitas hidup setara dengan komunitas masyarakat non perbatasan.

Selama ini pendekatan perencanaan pengembangan kawasan perbatasan lebih banyak ditekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*). Namun seiring

---

<sup>26</sup> <http://kuliah.litbang.dephes.go.id/index.php?menu=10&page=10>

dengan perkembangan kajian-kajian tentang kawasan perbatasan bahwa, kawasan perbatasan darat dan laut antarnegara merupakan kawasan yang masih rentan terhadap infiltrasi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya dari Negara lain. Di sisi lain, kawasan perbatasan antarnegara masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta minimnya infrastruktur di sektor perhubungan dan sarana kebutuhan dasar masyarakat. Keteringgalan pembangunan kawasan perbatasan baik darat maupun laut dengan negara tetangga secara sosial maupun ekonomi dikhawatirkan dapat berkembang menjadi kerawanan yang bersifat politis untuk jangka panjang. Upaya pembangunan wilayah perbatasan sendiri merupakan amanah UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Selama ini sebagian warga negara Indonesia masih mengalami kendala sosial, ekonomi, budaya dan keterbatasan daya dukung di wilayah yang dihuninya. Sebagaimana pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah lain relatif masih tertinggal, pembangunan wilayah perbatasan menganut pendekatan, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic need approach*), yaitu kecukupan konsumsi pangan, sandang dan perumahan yang layak huni.
- 2) Pemenuhan akses standar terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur mobilitas warga.

---

<sup>27</sup> Evaluasi Kebijakan Perencanaan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Direktorat Kewilayahan II Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional BAPPENAS 2006

- 3) Peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pembangunan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Disamping tiga pendekatan yang secara umum diterapkan dalam setiap program pembangunan, hal lain yang perlu memperoleh perhatian adalah konteks sosial budaya, adat istiadat, kondisi geografis dan keunikan komunitas dan kewilayahan yang dimiliki oleh wilayah perbatasan. Lebih khusus lagi, pengembangan kawasan perbatasan ini akan ditekankan pada tiga aspek utama sebagaimana ciri-ciri kawasan perbatasan, yaitu:

#### **1.5.3.1 Aspek Demarkasi dan Delimitasi Garis Batas**

Penetapan batas wilayah negara (demarkasi dan delimitasi) dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara. Upaya ini membutuhkan dukungan, seperti survei dan pemetaan wilayah perbatasan, penamaan (toponim) pulau, *border diplomacy*, hingga pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada dasarnya penetapan batas negara harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bilateral atau multilateral dan bukan bersifat unilateral. Beberapa permasalahan umum yang terkait dengan isu demarkasi dan delimitasi batas :

- 1) Belum terselesaikannya kesepakatan beberapa segmen garis batas dengan negara tetangga baik batas darat maupun batas laut.

- 2) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung bagi penetapan batas wilayah negara secara menyeluruh.
- 3) Pulau-pulau kecil terluar belum terkelola dengan baik

#### **1.5.3.2 Aspek Politik, Hukum dan Keamanan**

Tingginya potensi kerawanan di perbatasan menyebabkan perlunya perhatian khusus terhadap wilayah ini dalam hal peningkatan kesadaran politik, penegakkan hukum, serta peningkatan upaya keamanan. Permasalahan di perbatasan yang terkait dengan politik, hukum, dan keamanan yaitu :

- 1) Terbatasnya sarana prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan
- 2) Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan
- 3) Adanya sengketa wilayah dengan negara tetangga yang mengancam kedaulatan wilayah NKRI
- 4) Rendahnya aksesibilitas informasi, berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan

#### **1.5.3.3 Aspek Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana**

Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga, terutama wilayah yang



berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Permasalahan di perbatasan yang terkait dengan kesenjangan pembangunan antara lain:

- 1) Rendahnya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat-pusat pemerintahan dan pelayanan atau wilayah lainnya yang relatif lebih maju.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana baik pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih dan irigasi, ketenagalistrikan serta pertahanan keamanan.
- 3) Kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar karena karakteristik geografis masing-masing baik di wilayah kepulauan maupun pegunungan; Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.
- 4) Belum optimalnya pembangunan di wilayah perbatasan oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan baik dari segi teori maupun praktik. Penelitian ini merupakan langkah

awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi. Suatu penelitian harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti dibawah ini :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara kenyataan dalam praktek.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat eksploratif. penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Ciri-ciri penelitian eksploratori antara lain: <sup>28</sup>

- a. Topik belum dipahami benar.
- b. Peneliti belum tahu benar mengenainya/sesuatu yang akan diteliti.
- c. Persoalan atau masalah yang sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan mengenainya

- d. Sejak awal proyek penelitian hampir-hampir tiada sesuatu apapun yang diketahui mengenai masalah yang akan diteliti itu

### **3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di daerah perbatasan RI-Malaysia tepatnya di Kecamatan Senaning, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. karena di daerah tersebut banyak sekali terjadi masalah yang dikiranya dapat menggoyahkan keutuhan NKRI. Selain itu juga bagaimana mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kawasan perbatasan di Kecamatan Senaning. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2010 dan 2011

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti yaitu Bupati Kabupaten Sintang, Camat Kecamatan Senaning, Kapolres Kabupaten Sintang, Kepala Kantor Kecamatan Senaning, Kepala Kantor Kecamatan

## **b. Data Sekunder**

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diambil yaitu berupa catatan dalam laporan–laporan pertanggung jawaban dari pemerintah atau birokrasi terkait.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Teknik Wawancara**

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu (Moleong, 2002 : 135)<sup>29</sup>

Yaitu merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu dengan melakukan percakapan atau wawancara langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh berbagai keterangan atau jawaban yang dibenarkan dalam penelitian. Adapun subyek penelitian yang dimaksudkan yaitu :

---

<sup>29</sup> Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta, Remaja, 2001, Halaman 135

- 1) Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Bpk Mardiyansyah.
- 2) Wakapolsek Polsek Kecamatan Ketungau Hulu, IPTU Giarso.
- 3) Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Ketungau Hulu, BRIPKA S.Sihotang.
- 4) Kanit Provos Polsek Kecamatan Ketungau Hulu, BRIGADIR C.P. Simanjuntak.
- 5) BRIPDA Antonius Tomi.
- 6) BRIPDA Waluyo Utomo.
- 7) Kepala Desa di Desa Jasa, Bpk Along Suhardi.
- 8) Kepala BPD Desa Jasa, Bpk Diki Gideon.

**b. Teknik Observasi**

Metode Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>30</sup>

### c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mencari, mengenali hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>31</sup>

## 6. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan Penelitian Kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>32</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian

---

<sup>31</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi 2010). Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hal 238

kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Data yang diperoleh baik dari study lapangan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi